

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kemiskinan

2.1.1. Pengertian Kemiskinan

Pengertian kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat, padahal jika dilihat secara luas kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang baik sosial maupun budaya dari masyarakat. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari pemenuhan papan, sandang, maupun pangan. Fenomena seperti hal ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal seperti ini dapat kita lihat pada suatu Negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial. Badan Pusat Statistik (2014) menyebutkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlangsung, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2/hari.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat dimana ia

Regiza Rossa Lediana, 2018

PERENCANAAN PROGRAM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN JATIHANDAP KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

memiliki kehidupan yang hak dasarnya tidak terpenuhi hak dasar masyarakat sendiri adalah berupa sandang, pangan, dan papan.

Sugandi (2016) mengatakan bahwa sejak tahun 2000 pemerintah bermaksud untuk melaksanakan agenda penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

2.1.1.1 Menyusun pedoman bagi lembaga local untuk merumuskan program pembangunan pro rakyat miskin dan prosedur penganggaran dan memberikan pendampingan teknis bagi lembaga ini untuk melaksanakan program secara desentralisasi.

2.1.1.2 Menevaluasi efektifitas semua program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kerangka kebijakan untuk membuat keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.

2.1.1.3 Membuat daftar alokasi hibah luar negeri untuk setiap program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan kompatibilitas dari berbagai program. Pemerintah harus mempublikasikan daftar dan temuan dalam metode partisipatif kepada masyarakat miskin.

2.1.1.4 Melakukan analisis kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program untuk peraturan dan keuangan yang pro rakyat miskin, kredibel, dan akuntabel.

1.2.1.1.5 Melanjutkan rumus PRSP (*Proverty Reduction Strategy Paper*) sebagai bagian integral dari kerangka kerja kebijakan pembangunan jangka panjang

2.1.2. Karakteristik Kemiskinan

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1993:4), umumnya lemah dalam kemampuan berusahadan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Selain itu Chamber (1983:109) mengemukakan empat karakteristik sebagai ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain : (a) *proverty*, (b) *physical weakness*, (c) *isolation*, (d) *powerlessness*. Selanjutnya Moeljarto (1995:98) mengemukakan tentang *Proverty Profile* sebagaimana berikut : Masalah kemiskinan bukan saja masalah *Welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain : (a) masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan, (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga

membuatnya tidak berdaya, (d) kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagai besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas., (e) tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar, (f) adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus. Kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah tetapi banyak hal juga seperti kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Chambers dalam Naskun dalam Ali Khomsan dkk (2015:3) kemiskinan dapat dibagi kedalam empat bentuk, yaitu :

2.1.2.1 Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2.1.2.2 Kemiskinan relatif : Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah masyarakat sekitarnya.

2.1.2.3 Kemiskinan kultural : mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

2.1.2.4 Kemiskinan struktural : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan,tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Sugandi (2016:122) kemiskinan di kota Bandung terjadi karena (a). Adanya miskoordinasi antara sector Swasta, Komite, dan Pemerintah (b). Sebagian besar kredit mikro yang diberikan kepada penduduk miskin, tidak digunakan untuk kepentingan usaha, tapi untuk konsumsi sehari-hari (kebanyakan mereka keluarkan untuk sekolah anak-anak dan membeli makanan untuk konsumsi sehari-hari)(c). Penduduk miskin di Bandung tidak mendapatkan pelatihan yang baik untuk menjalankan usaha dengan baik. (d). Ada semacam budaya kemiskinan di Indonesia yang terlihat dafri sebagian orang miskin yang menggunakan uang dari pemerintah untuk dihabiskan dengan prinsip bahwa “uang pemerintah adalah uang rakyat” hal ini menyedihkan karena Negara Indonesia mendapat pinjaman dari bank

Dunia dan harus dibayar oleh generasi selanjutnya (e). dari penelitian sebelumnya di Bandung ditemukan bahwa orang-orang miskin menunjukkan gejala budaya pasca-populis meniru orang kaya (Hedonisme) dengan menghabiskan uang untuk hal-hal selain kebutuhan dasar.

2.2 Konsep Perencanaan

2.2.1. Pengertian Perencanaan

Menurut Anwar (2007:41) mendefinisikan bahwa perencanaan adalah upaya menentukan sebelumnya apa yang sebelumnya harus dilakukan dan bagaimana strategi dan teknik melakukannya. Hal ini merupakan proses sebelum terjadinya pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan sebelumnya terdapat pilihan dari tindakan yang akan dilakukan. Melalui perencanaan tindakan tersebut dipikirkan secara matang untuk kemudian di ambil menjadi sebuah program. Selain itu menurut Sudjana (2010:55) mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilakukan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Suharto (2005:72) juga mengungkapkan bahwa perencanaan merupakan usaha secara sadar, terorganisir, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pengeloaahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditunjukkan untuk mencari jawaban dan memecahkan masalah.

Menurut Sudjana (2010:56) mengatakan bahwa keputusan yang diambil haruslah dilakukan karena dua alasan, pertama, untuk mewujudkan kemajuan dan keberhasilan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang kedua, adalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, dan kondisi yang sama atau lebih rendah daripada keadaan saat ini.

Suatu perencanaan tidak terlepas dari komponen-komponen yang menyertainya. Adapun komponen-komponen perencanaan menurut Anwar (2007:41) meliputi (1) Analisis system menyeluruh (2) Menentukan kemampuan populasi target (tantangan dan kekuatan), (3) Mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan (4) Merumuskan maslah dan tujuan belajar. Sedangkan perencanaan menurut Suharto (2005:75) dapat dirumuskan menjadi lima tahapan yaitu (a) identifikasi masalah, (b) penentuan tujuan, (c) penyusunan dan pengembangan rencana program, (d) pelaksanaan program, dan (e) evaluasi program.

2.2.2. Fungsi dan Karakteristik Perencanaan

Menurut Sudjana (2010;56) Perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pertama, upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau sumber-sumber yang dapat disediakan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Kedua, perencanaan merupakan kegiatan yang mengarahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan diharapkan dihindari penyimpangan sekecil mungkin. Sesuai dengan pengertian di atas, perencanaan mempunyai ciri-ciri :'

2.2.2.1 Perencanaan merupakan model pengambilan keputusan secara rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan

2.2.2.2 Perencanaan berorientasi pada perubahan dari keadaan masa sekarang kepada suatu keadaan yang diinginkan pada masa datang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai.

2.2.2.3 Perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan.

2.2.2.4 Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta siapa pihak yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan itu.

2.2.2.5 Perencanaan melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui atau dilaksanakan.

2.2.2.6 Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang dilakukan.

2.2.2.7 Perencanaan sebagai titik awal untuk dan arahan terhadap kegiatan pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan.

2.3. Pemberdayaan masyarakat Miskin

2.3.1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Suharto (2005:59) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sedangkan menurut Rappapor dalam Hikmat (2010:3) pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-hak nya menurut Undang-undang. Pemberdayaab merupakan proses bagi individu tau kelompok untuk keluar dari kondisi lemah, tidak berdaya, kemiskinan dan terpinggirkan. Melalui proses pemberdayaan diharapkan individu atau kelompok mempunyai daya atau kekuatan untuk menuju hidup yang lebih baik lagi.

Menurut Ambar T Sulistiyani (2004:77) Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebu-tuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembel-ajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara berta-hap, terus-menerus, dan berkelanjutan. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional memebagi jalur pendidikan di Indonesia menjadi kedalam tiga bagian yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Ketiga jalur tersebut mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat terutama pendidikan nonformal dimana pendidikan tersebut secara terstrktur dapat melayani orang yang belum berdaya menjadi orang yang berdaya. Pemberdayaan masyarakat termasuk kedalam pendidikan non formal. Hal itu sesuai dengan Kusnadi (2007:78) yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran atau pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya.

Jadi pemberdayaan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memberi kekuatan, daya atau power bagi masyarakat baik tingkat individu atau kelompok yang bertujuan untuk mendapati kehidupan

yang lebih baik dari sebelumnya atau keluar dari masalah terpinggirkan, lemah tidak berdaya dan miskin sehingga masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang mandiri.

2.3.2. Model Pemerdayaan Masyarakat

Menurut Jack Rothman dalam Hikmat (2010:53) menyatakan bahwa dalam praktek pengembangan masyarakat terdapat tiga model yaitu :

2.3.2.1 Model Pengembangan Lokal (*Locallity Development Model*)

Perubahan ini menjadikan partisipasi masyarakat sebagai kunci dari pengembangan yang dilakukan. Model ini mengharuskan masyarakat berperan aktif dalam program pengembangan. Pembangunan tingkat local ini berpandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat tingkat paling bawah (*grassroot*) dalam pengambilan keputusan pelaksanaan tindakan-tindakan. Tujuan yang ingin dicapai bukan hanya tujuan akhir tetapi juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Tujuan akhir tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara-cara kerja sama atas dasar atau atas prinsip swakarya dan menggunakan proses atau prosedur yang demokratis sebagai tujuan pokoknya,

Strategi dasar untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk menciptakan semangat agar masyarakat terlibat aktif di dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, perumusan kebutuhan, maupun dalam pemecahan masalah mereka sendiri. Jadi strateginya adalah mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan itulah yang menjadi tujuan utama proses perubahan.

2.3.2.2 Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*)

Penyusunan perencanaan program dalam model ini merupakan hal yang utama. Penyusunan perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat yang menjadi subjek program. Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substansif. Selain itu model ini juga menganggap penting menggunakan perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Dapat dikatakan bahwa sasaran atau tujuan utama yang ingin dicapai dalam model pendekatan ini adalah menciptakan, menyusun dan

memberikan bantuan-bantuan, baik yang bersifat materi maupun pelayanan-pelayanan yang berbentuk jasa kepada masyarakat yang membutuhkannya. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah mengumpulkan atau mengungkapkan fakta dan data mengenai sesuatu permasalahan. Kemudian mengambil tindakan yang rasional dan feasible (mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan). Jadi, strateginya adalah mengumpulkan dan menganalisis fakta dan data tentang permasalahan dilanjutkan dengan menetapkan cara terbaik dalam penyusunan program, dalam memberikan pelayanan atau dalam melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di masyarakat.

2.3.2.3 Model Aksi Sosial (*Social Action Model*)

Model ini sangat berpihak kepada suatu kelompok yang tidak beruntung. Kelompok yang tidak beruntung akan ditangani secara terorganisasi, terarah dan sistematis. Model ini menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber sumbernya sehingga tercipta keadilan sosial dan demokrasi. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah menggerakkan golongan-golongan masyarakat tertentu guna terlibat aktif dalam mengadakan perubahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh perubahan model ini adalah mengubah system atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadai sendiri.

Strategi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah mengadakan usaha-usaha yang lebih terorganisir untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Tindakan masyarakat yang terarah dan terorganisir ini ditunjukkan kepada lembaga-lembaga tertentu, juga untuk seseorang atau sekelompok orang. Untuk melakukan metode ini hendaknya harus berikap hati-hati dan melihat konteks permasalahan yang dialami masyarakat secara proporsional.

2.3.3. Ciri-ciri Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Kindervetter (dalam Kamil, 2012 : 57) menyebutkan ciri mendasar yang dapat di identifikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal meliputi :

2.3.3.1 *Small group structure*, yaitu pembentukan kelompok kecil yang dapat dilakukan berdasarkan umur yang sama, minat yang sama dan sukarela. *Empowering* menekankan pada kebersamaan langkah yang memungkinkan kelompok dapat berkembang,

2.3.3.2 *Transfer of responsibility*, yaitu pemeberian tanggung jawab kepada warga belajar ini sudah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, penyusunan program, sampai dengan evaluasi program yang sudah dilakukan

2.3.3.3 *Participant leadership*, yaitu kepemimpinan kelompok dipegang oleh warga belajar. Semua kegiatan diatur oleh kelompok, sehingga semua warga belajar memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan

2.3.3.4 *Agent as facilitator*, yaitu agen, guru, tutor sebagai pendidik berperan sebagai fasilitator.

2.3.4 Tahapan Pemberdayaan

Menurut Ambar T Sulistiyani (2004 : 83-84) terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan pemberdayaan, yaitu :

2.3.4.1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahapan ini merupakan tahapan persiapan dalam proses pemberdayaan. Pihak pemberdaya/actor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

2.3.4.2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Individu akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan mensimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini, masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

2.3.4.3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dalam kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

2.3.5. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Ustman (2010:1) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengandalkan apa yang mereka lakukan tersebut. Sedangkan menurut Suharto (2005:60) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalkan

karena persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:410) dalam melakukan pengembangan masyarakat banyak dimensi yang harus diperhatikan. Dimensi tersebut bersifat berhubungan satu sama lain dalam bentuk yang kompleks. Dikemukakan bahwa beberapa lebih fundamental daripada lainnya misalnya banyak orang (khususnya orang pribumi) akan beranggapan bahwa pengembangan personal/spiritual merupakan landasan untuk semua pengembangan yang lain. Tetapi untuk tujuan penyusunan model pengembangan masyarakat dan model pemikiran tentang peran pekerja masyarakat, keenam dimensi ini adalah hal yang sangat penting. Keenam dimensi tersebut yaitu, (1) Pengembangan sosial, (2) Pengembangan ekonomi, (3) pengembangan politik, (4) Pengembangan budaya, (5) Pengembangan lingkungan, (6) Pengembangan personal/spiritual. Dalam situasi tertentu, tidak semua dimensi akan memiliki prioritas yang setara. Masyarakat manapun akan mengembangkan keenam dimensi tersebut untuk level-level yang berbeda, misalnya satu masyarakat mungkin memiliki basis ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang sehat dan identitas budaya yang kuat tetapi sekaligus memiliki pelayanan kemanusiaan kurang baik, lingkungan fisik yang buruk, harga diri yang rendah dan tingkat pengasingan yang tinggi. Dalam masyarakat yang demikian, pengembangan lingkungan dan personal/spiritual akan menjadi prioritas tertinggi dalam program pengembangan masyarakat. Namun begitu, masyarakat lainnya akan mencerminkan gambaran yang berbeda dan memerlukan prioritas yang berbeda dalam proses pengembangan. Penjelasan mengenai dimensi pengembangan yang diungkap Ife dan Tesoriero (2008:411-482) adalah :

2.3.5.1. Pengembangan Sosial

Pengembangan sosial merupakan pengembangan pelayanan sosial yang mencakup identifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tersedianya struktur serta pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan pengembangan sosial kadang tidak untuk mendirikan pelayanan masyarakat yang baru, tetapi untuk membantu pelayanan yang ada untuk berfungsi lebih efektif melalui koordinasi dan perencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu, hasil dari proses tersebut mungkin berupa terbentuknya struktur perencanaan dan koordinasi yang baru. Idealnya melibatkan partisipasi warga secara luas dan perwakilan pandangan dari mereka yang sangat dirugikan. Pelayanan yang dibentuk dalam cara ini menjadi bagian dari konstelasi pelayanan kemanusiaan yang ada yang dikelola sesuai dengan pola-pola yang cukup tradisional

dan melalui penyadaran pemerintah. Dalam konteks pelayanan sosial istilah perencanaan sosial seharusnya tidak diartikan sebagai pemaksaan diri atas mengenai rencana besar atau aktivitas yang sangat teknis. Perencanaan sosial merupakan proses orang-orang di sebuah masyarakat yang membatasi kebutuhan mereka dan merencanakan bagaimana untuk mencukupi kebutuhan mereka maupun mengoordinasikan pelayanan dan sumber daya yang ada dan menggunakannya secara maksimal.

Selain melalui perencanaan yang baik pengembangan sosial jua membutuhkan balai masyarakat atau the neighbor house sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas kemasyarakatan. Balai masyarakat bukanlah konsep yang baru, dan selalu menjadi komponen penting dalam pengembangan masyarakat. Gagasan sederhana untuk menyediakan tempat pertemuan sentral dengan sourcing (staff,relawan,dana, perlengkapan,dll) masih menjadi unsur penting dalam banyak pekerjaan pengembangan masyarakat. Lokasi tersebut dapat digunakan sebagai tempat rekreasi, pendidikan, politik, budaya, kesehatan, advokasi dll. Inisiatif untuk mengembangkan balai masyarakat atau neighborhood house dapat diperoleh dari sejumlah tempat tinggal yang termasuk pemerintah, kelompok masyarakat lokal, balai keagamaan dll. Disamping beberapa kegunaan mengenai balai masyarakat, neighbourhood house juga berfungsi secara efektif yaitu orang-orang setempat harus memiliki kontrol yang besaar atas pelaksanaannya. Demikian pula dengan dukungan finansial, sumber-sumber finansial untuk balai masyarakat lebih mengutamakan bantuan dari pemerintah.

Oleh karena itu, semangat sosial harus dimiliki masyarakat. Semangat sosial yang berkualitas terlihat dari komunikasi antar masyarakatnya. Disinilah masyarakat dituntut untuk aktif sehingga nantinya potensi mereka bisa terlihat. Kualitas masyarakat dilihat dari proses bukan hasil. Jika masyarakat ingin berkembang maka masyarakat itu harus mengikuti proses yang tidak instan. Dapat di lihat bahwa jika masyarakat tersebut mengikuti proses dengan sangat baik maka hasilnyaapun akan baik.

2.3.5.2. Pengembangan Ekonomi

Globalisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik dan kekuatan kapitalis transnasional telah membawa dampak pada banyak orang. Hal ini terlihat dari pengangguran yang tinggi di dalam masyarakat, ditambah lagi dengan istilah “pengangguran tersembunyi” yakni mereka yang tidak terhitung secara statistik. Mereka menginginkan pekerjaan tetap dan menginginkan pekerjaan yang lebih bagus dari pekerjaan sebelumnya.

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi kali ini dikelompokkan menjadi dua cara. Cara pertama yaitu adalah dengan pengembangan ekonomi masyarakat secara konservatif dimana dalam cara ini masyarakat ikut berpartisipasi. Lalu cara kedua adalah cara yang lebih radikal, dimana masyarakat di bantu untuk lebih berfungsi efektif

2.3.5.3. Pengembangan Politik

Pengembangan politik berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Politik sendiri pada dasarnya menyangkut perihal kekuasaan. Oleh karena itu, menganalisis kekuasaan dalam masyarakat itu melihat bagaimana cara-cara penyaluran, pengurusan dan pelaksanaannya merupakan satu hal yang sangat penting. Pengembangan politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap politik. Aktivitas politik tersebut menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan keputusan.

Pengembangan politik internal terkait dengan proses partisipasi dan pembuatan keputusan dalam masyarakat. Pengembangan ini berupa mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu ada pengembangan politik eksternal yang menunjuk pada pemberdayaan masyarakat dalam interaksinya atau biasa disebut aksi sosial.

2.3.5.4. Pengembangan Budaya

Budaya universal saat ini sangat berkembang secara pesat hal ini diakibatkan media global yang dikendalikan secara luas. Televisi, music, arsitektur, makanan, minuman, pakaian, film sport dan bentuk-bentuk hiburan lainnya menjadi serupa di belahan dunia manapun. Untuk menghadapi globalisasi budaya sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya. Tidak hanya budaya yang semakin universal, tetapi budaya juga merupakan bahan yang dikomoditikan. Aktivitas budaya menjadi sesuatu yang dapat dikemas, di produksi, dan diperjual belikan.

Aktivitas budaya merupakan focus penting untuk identitas masyarakat. Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya memiliki komponen melestarikan dan menghargai budaya lokal dimana hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat. Satu cara untuk mendorong masyarakat yang sehat yaitu dapat mendorong partisipasi yang luas dalam aktivitas budaya.

2.3.5.5. Pengembangan Lingkungan

Lingkungan merupakan komponen yang penting dalam masyarakat, dan perlu dicakup dalam pendekatan yang terpadu terhadap pengembangan masyarakat. Pendekatan ini berlaku untuk lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Pengembangan lingkungan dapat juga

dilihat sebagai gerakan menembus batas-batas masyarakat lokal. Analisis Green menekankan bahwa kita hidup di satu dunia yang terbatas, dan bahwa setiap masyarakat memiliki tanggung jawab melindungi ekosistem global. Hal ini tidak hanya memberikan justifikasi, tetapi juga sebagai suatu keharusan untuk bergerak melewati persoalan-persoalan yang murni lokal.

Pengembangan lingkungan perlu mengatasi problem-problem dan stereotipe ini; faktanya bahwa isu-isu lingkungan perlu mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting ditekankan bahwa pengembangan lingkungan dan aktivisme lingkungan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.

2.3.5.6. Pengembangan Personal/Spiritual

pengembangan sosial menekankan pada pengembangan dan pemberian pelayanan kemanusiaan seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan perawatan orang-orang yang memerlukan asuhan. Pelayan tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga pelayanan ini menjadi komponen penting dari agenda pengembangan sosial.'

Pengembangan personal merupakan pengembangan struktur interaktif masyarakat yang kuat. Pengembangan personal ini dapat juga membantu membangun masyarakat dengan membangun struktur yang kuat dan pertalian lebih erat di masyarakat. Bagi sebagian orang rasa memiliki tujuan dan berharga ini sangat penting hal ini dapat dipahamu sebagai kebutuhan spiritual. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan yang mendasar bagi pengembangan masyarakat untuk memasukkan gagasan-gagasan perkembangan spiritual.

2.3.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 147) ada tiga macam strategi dalam pemberdayaan masyarakat yang mampu digunakan sebagai strategi untuk memperlancar proses terjadinya pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

2.3.6.1 Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan. Pemberdayaan yang dilaksanakan dengan membangun struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

2.3.6.2 Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik. Pemberdayaan ini menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Bagaimana ini diterapkan bergantung pada pemahaman kita tentang kekuasaan dalam proses politik. Tetapi ia menekankan pendekatan aktivis dan berupaya untuk

memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya melalui sebetulnya aksi langsung atau dengan memperlengkapi mereka agar lebih efektif di arena politik.

2.3.6.3 Pemberdayaan melalui pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Ini termasuk gagasan-gagasan peningkatan kesadaran membantu masyarakat memahami masyarakat dan struktur operasi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya.

2.4 Dasar Hukum LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Peraturan daerah kota Bandung tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 2 LPM berkedudukan di Kelurahan. Pasal 3 (1)

2.4.1 Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah; b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; c. Memantau pelaksanaan pembangunan; d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

2.4.2 Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan; b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.